

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Penyelenggaraan Pemerintah Penggunaan Anggaran biasanya dilakukan dalam beberapa hal, yaitu: Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Belanja Pegawai/Aparat, Belanja Barang, Belanja Pembangunan dan lain-lain.

Pemerintah akan melakukan rancangan terlebih dahulu sebelum anggaran itu digunakan. Rancangan Anggaran itu terbagi menjadi dua hal, yaitu: Pendapatan dan Belanja. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya. Contohnya saja dari penjualan, produk, atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan Belanja merupakan perolehan barang atau jasa dari penjualan dengan tujuan membeli. Belanja adalah aktivitas pemilihan dan/atau membeli, dalam beberapa hal dianggap sebagai kebutuhan perusahaan atau masyarakat.

Pendapatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pajak dan Non Pajak. Pajak adalah iuran atau pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Undang Undang, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau salah satunya digunakan untuk memperbaiki jalan, taman, fasilitas kota untuk kenyamanan masyarakat itu sendiri.

Di dalam jenis pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat berada di Ibu Kota Negara atau Jakarta, sedangkan Pajak Daerah salah satunya terdapat di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Salah satu jenis Pajak Daerah terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang Undang Nomor

12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.

Kabupaten Kuningan adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai luas wilayah 107.597 ha, terdiri dari 32 Kecamatan, 361 Desa dan 15 Kelurahan. Jumlah penduduk (tahun 2008) sebanyak 1.111.760 jiwa dengan kepadatan secara keseluruhan 994 jiwa, mayoritas pencaharian penduduknya sebagai petani, hal ini ditunjang oleh luas wilayah yang memadai dengan sistem pengairan atau irigasi yang cukup baik. Dengan luas wilayah yang tertera diatas, Kabupaten Kuningan menetapkan pajak untuk keberlangsungan Kabupaten Kuningan itu sendiri, dimana jumlah penduduk yang tertera diatas Kabupaten Kuningan secara bertahap dapat memperbaiki tata ruang kota, fasilitas umum, memperbaiki jalan, membuat gedung olahraga, taman dan lain-lain.

Bupati Kabupaten Kuningan mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor 973/KPTS.46-DIPENDA/2008 Tanggal 25 Pebruari 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN KUNINGAN**. Dan Bupati Kabupaten Kuningan mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor 973/194/DIPENDA/2009 Tanggal 15 Juni 2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASIPENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KUNINGAN**.

Pada tabel dibawah ini akan digambarkan nilai Target dan nilai Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Kuningan dalam 1 periode dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

**TABEL 1.1.1**  
**Target, Realisasi dan Persentase Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**  
**Kabupaten Kuningan**  
**Tahun 2009–2013**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2009	9.954.170.000,00	11.056.688.613,00	111,08%
2010	11.398.427.000,00	11.451.509.297,00	100,47%
2011	11.209.657.737,00	11.906.627.445,00	106,22%
2012	9.988.645.131,00	14.027.068.781,00	140,69%
2013	13.778.097.862,00	14.475.810.311,00	105,06%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan

Dilihat dari tabel diatas nilai target dan nilai realisasi pajak bumi dan bangunan di daerah Kabupaten Kuningan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup baik, karena setiap tahunnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuningan memenuhi target bahkan lebih dari yang ditargetkan. Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan mengalami penurunan nilai target, karena di Kabupaten lain nilai realisasinya dibawah nilai target.

Jika dilihat dari hasil Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi, hal itu mencerminkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan diindikasi adanya potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengamatan mengenai prosedur pajak bumi dan bangunan (PBB). Penulis sajikan penelitian ini dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan atas Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan Jawa Barat ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan Jawa Barat dalam Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan ?

## **1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan umum kerja praktik ini adalah mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh dalam Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan Jawa Barat dalam Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir**

Hasil yang diperoleh dari kerja praktik ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai alat pembanding antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terdapat dalam suatu perusahaan atau pemerintahan dan juga sebagai alat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Bagi Perusahaan/Pemerintahan**

Sebagai bahan masukan dan saran bagi perusahaan atau pemerintahan mengenai pentingnya diterapkan Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **3. Bagi Pihak Lain**

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai Prosedur Penerimaan, Perhitungan, dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat digunakan menjadi referensi dalam menyusun Laporan Tugas Akhir.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Praktik**

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Waktu yang dilaksanakan untuk pengamatan pada bulan November sampai dengan selesai.